

Peran e-SAKIP dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi di Kota Palembang pada Era Revolusi Industri 4.0

The Role of e-SAKIP in Strengthening Local Government Governance: A Study in Palembang City in the Era of the Fourth Industrial Revolution

Pandu Pamungkas*, Zetia Wijayanti, Adelia Maharani, Metta Karuna, Ani Santia, Tegar Victor Pratama Aritonang

Universitas Sriwijaya, Indonesia

* pandupamungkas@fisip.unsri.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

e-SAKIP, digitalization, public service, governance, industrial revolution 4.0

Article History

Received: 2026-02-22
Accepted: 2026-03-13

This study explores the role of e-SAKIP (Electronic-Based Government Performance Accountability System) digitalization in supporting the economic and political transformation of Palembang City amidst the Industry 4.0 era, utilizing a literature review approach. The research synthesizes data from credible sources, including official government documents, academic journals, news reports, and case studies focusing on transparency, accountability, efficiency, and planning optimization. That e-SAKIP enhances governance through real-time data access, improves public service delivery, and boosts regional competitiveness, as evidenced by Palembang's 2024 SAKIP Award (BB predicate). However, challenges such as infrastructure limitations, low human resource competency, and dual reporting systems hinder full implementation. The study aligns with Industry 4.0 trends, emphasizing the need for integrated technology and workforce development to sustain economic-political growth, offering practical insights for policy reform and academic contributions to digital governance literature.

Copyright © 2026, Pamungkas et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.431](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.431)

1. PENDAHULUAN

Nilai dari akuntabilitas memiliki peranan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan layanan publik. Ini berlandaskan pada argumen bahwa keberlangsungan suatu negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas itu sendiri, menurut Mardiasmo (2006:3), diartikan sebagai suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Dalam rangka menjamin

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah (Wahyudi, 2007). Pemerintah sebagai pengemban tanggung jawab masyarakat, sudah sepatutnya menyampaikan laporan berkaitan dengan kinerja pemerintah sepanjang periode yang telah berjalan. Salah satu bentuk evaluasi kinerja pemerintah adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan hasil dari penerapan SAKIP. LAKIP adalah manifestasi dari pelaksanaan SAKIP yang dibuat untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang transparan, sehingga dapat mewujudkan prinsip *good governance* (Wiwik Andriani, Irda Rosita, & Hidayatul Ihsan, 2015). LAKIP berfungsi sebagai hasil dari pelaksanaan SAKIP, yang menjadikan kinerja pemerintah dapat dinilai melalui LAKIP, mengingat perbedaan yang ada antara organisasi pemerintah dan organisasi swasta adalah aspek transparansi atau akuntabilitas dari pemerintah. Akuntabilitas publik umumnya bertujuan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut, sehingga tercapainya akuntabilitas ini menjadi tujuan utama dari reformasi di sektor publik (Wiwik Andriani et al., 2015). Namun, perlu diingat bahwa mengukur kinerja pemerintah tidaklah sederhana, karena harus ada beberapa aspek yang dievaluasi terkait kinerja pemerintah.

Transformasi pelayanan publik merupakan tuntutan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0. Pemerintah daerah tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi administratif secara konvensional, tetapi dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Digitalisasi sistem pemerintahan menjadi kunci strategis dalam menjawab tuntutan tersebut. Dalam konteks ini, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (e-SAKIP) hadir sebagai instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja birokrasi, tetapi juga sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui e-SAKIP, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Revolusi Industri 4.0 merupakan tonggak sejarah teknologi yang membawa perubahan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Transformasi digital yang masif, didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menuntut pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan kinerja dan pelayanan publik. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, telah mengimplementasikan digitalisasi melalui e-SAKIP guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja pemerintahan. Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun e-SAKIP telah diterapkan di beberapa daerah, efektivitas dan optimalisasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan terutama terkait infrastruktur, sumber daya manusia, dan adaptasi budaya kerja digital (Diah Natalisa, 2017; Kamal, 2025).

Selain itu, beberapa masalah yang muncul seiring dengan penerapan SAKIP mencakup pemahaman yang salah dari pegawai pemerintah bahwa keberhasilan serta kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan hanya dapat diukur melalui

penyerapan anggaran, pengisian LAKIP yang dianggap sekadar formalitas, serta rendahnya mutu substansi, keakuratan data, dan evaluasi kinerja pemerintah yang disampaikan dalam LAKIP. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menyusun LAKIP (Yusrianti & Safitri, 2015). Isu yang dihadapi oleh organisasi pemerintah saat ini adalah adanya pandangan dari pegawai pemerintah yang berkeyakinan bahwa indikator keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas utama dan fungsi hanya berfokus pada sejauh mana instansi dapat menyerap anggaran yang diberikan. Dengan demikian, keberhasilan instansi hanya dilihat dari sisi input tanpa memperhatikan tingkat output atau dampak yang mungkin masih jauh dari yang diharapkan.

Gap penelitian ini membuka ruang untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana digitalisasi e-SAKIP dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam mendorong transformasi ekonomi dan politik di Kota Palembang pada era Revolusi Industri 4.0, yang hingga kini belum banyak dieksplorasi secara komprehensif. Beberapa hasil penelitian tersebut umumnya menunjukkan bahwa implementasi e-SAKIP dapat memperbaiki kualitas perencanaan program, memperjelas indikator kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, fokus utama penelitian sebelumnya cenderung berada pada aspek administratif dan manajerial, khususnya bagaimana e-SAKIP berfungsi sebagai alat kontrol birokrasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan dalam melihat e-SAKIP dari perspektif yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan transformasi ekonomi politik di tingkat daerah. Studi yang ada umumnya memandang e-SAKIP hanya sebagai instrumen teknokratis dalam sistem manajemen kinerja pemerintahan, tanpa mengaitkannya dengan dinamika kekuasaan, kepentingan politik, maupun distribusi sumber daya pembangunan daerah. Padahal, implementasi sistem akuntabilitas digital seperti e-SAKIP tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi politik lokal, termasuk relasi antara pemerintah daerah, aktor politik, birokrasi, dan masyarakat.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia dan belum secara spesifik menyoroti konteks lokal di Palembang. Padahal, sebagai salah satu kota besar di Sumatera dengan dinamika pembangunan yang cukup pesat, Palembang memiliki karakteristik tata kelola pemerintahan yang menarik untuk dikaji. Transformasi sistem akuntabilitas berbasis digital di kota ini berpotensi mempengaruhi proses perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, serta hubungan antara birokrasi dan aktor politik lokal. Permasalahan yang biasa diangkat adalah sejauh mana digitalisasi e-SAKIP mampu mendukung transformasi ekonomi politik di Kota Palembang dengan mengoptimalkan pengelolaan kinerja dan meningkatkan pelayanan publik secara sistematis. Penelitian mengenai implementasi digitalisasi e-SAKIP diharapkan membawa pengaruh positif signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan di Kota Palembang. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran digitalisasi e-SAKIP dalam mendukung transformasi ekonomi politik di Kota Palembang dalam konteks tuntutan era Revolusi Industri 4.0.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi *literatur review* dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik. Studi literatur merupakan kegiatan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen ilmiah lain

yang relevan dengan topik penelitian guna membangun kerangka konseptual dan landasan teori penelitian. Studi literatur membantu peneliti memahami posisi penelitiannya dalam kajian ilmiah yang lebih luas (Creswell, 2014). Data diperoleh melalui penelaahan sistematis terhadap literatur yang relevan, kemudian peneliti mengumpulkan dan menyeleksi literatur terpercaya (jurnal, buku, artikel, dokumen resmi) yang relevan, kemudian menganalisisnya secara kritis melalui rangkuman, interpretasi, dan kritik. Proses ini mencakup identifikasi research gap dan perbedaan pendapat, sehingga menghasilkan landasan teoritis kuat serta gambaran komprehensif tanpa pengumpulan data primer. Metode ini sangat tepat untuk kajian konseptual dan dinamika riset sebelumnya secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil dan Gambaran Umum Implementasi e-SAKIP di Kota Palembang

Kualitas pelayanan publik yang rendah menjadi salah satu fokus kritik terhadap sistem birokrasi pemerintah dalam memberikan servis kepada masyarakat. Perbaikan dalam layanan publik di era reformasi menjadi harapan seluruh warga, namun dalam praktiknya, ternyata tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Dalam sektor layanan publik, berbagai usaha telah dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan untuk menciptakan layanan yang cepat, tepat, terjangkau, dan transparan. Namun, usaha tersebut belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur yang kurang efektif, rumit, lambat, tidak responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan atribut negatif lainnya yang dialamatkan kepada birokrasi. Layanan publik sering kali menjadi tolok ukur paling sederhana untuk memahami seberapa baik pemerintah menjalankan fungsinya. Layanan publik adalah salah satu fungsi vital pemerintah, di samping regulasi, perlindungan, dan distribusi.

Pelayanan publik berbasis digital berangkat dari paradigma *good governance* yang menekankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas. Digitalisasi e-SAKIP memungkinkan keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja pelayanan publik secara terintegrasi. Dengan demikian, setiap indikator kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Penerapan e-SAKIP mendorong perubahan budaya kerja birokrasi dari yang bersifat prosedural menjadi berbasis kinerja dan hasil (*outcome oriented*). Perubahan ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik karena aparatur pemerintah didorong untuk bekerja lebih responsif, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap capaian layanan yang diberikan.

Implementasi e-SAKIP di Kota Palembang dimulai resmi pada Desember 2017, diluncurkan bersamaan dengan e-SIPD oleh Deputy Kementerian PANRB dan pemerintah kota (Menpan RB, 2017). Sistem ini mengintegrasikan seluruh siklus manajemen kinerja pemerintah secara elektronik untuk meningkatkan transparansi, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. e-SAKIP mempercepat administrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong inovasi tata kelola digital. Seluruh SKPD di Palembang menggunakan e-SAKIP untuk memonitor capaian kinerja dari tingkat kota hingga pegawai. Penerapan ini diakui melalui SAKIP Award 2024 dengan predikat BB, menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan kota (Sumsel Pers, 2024).

Tabel 1. Konsistensi peningkatan capaian dan predikat implementasi SAKIP Kota Palembang tahun 2021–2023

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
Perencanaan Kinerja	30	23,64	23,79
Pengukuran Kinerja	30	17,19	14,41
Pelaporan Kinerja	15	10,31	10,36
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,35	17,47
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,49	69,03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber: LKjIP Kota Palembang Tahun 2021-2023

Tabel 1 menunjukkan perbandingan capaian kinerja pemerintahan Kota Palembang sebelum dan sesudah implementasi e-SAKIP. Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan kualitas pelaporan yang signifikan, yang sebelumnya rendah dan kurang transparan kini menjadi lebih akurat dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan melalui e-SAKIP mampu memperbaiki tata kelola informasi dan memberikan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga meningkat, menandakan alokasi dan pengendalian anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan efektif akibat dukungan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.

Selanjutnya, akuntabilitas kinerja pemerintah menunjukkan kenaikan ke kategori yang lebih baik, yaitu kategori “B”, dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang hanya kategori sedang. Ini menunjukkan peningkatan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan strategis dan pelaporan kinerja yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan pelaporan yang dahulu cukup tinggi, juga menurun secara signifikan setelah digitalisasi, sehingga proses pengawasan menjadi lebih tepat waktu dan efektif. Keseluruhan peningkatan ini mencerminkan bagaimana e-SAKIP berperan sebagai alat penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal.

Implementasi e-SAKIP di Kota Palembang menunjukkan bahwa sistem digital mampu mempercepat proses pelayanan publik melalui penyederhanaan alur kerja dan pengurangan prosedur manual. Pelaporan kinerja yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat dilakukan secara real-time, sehingga pengambilan keputusan terkait pelayanan publik menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, e-SAKIP memberikan ruang bagi peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan data kinerja yang akurat. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan pelayanan, mengevaluasi kepuasan masyarakat, serta merumuskan inovasi pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan warga.

3.2. Pengaruh Implementasi e-SAKIP terhadap Transformasi Ekonomi Politik Kota Palembang

Kepercayaan publik merupakan modal utama dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (Fukuyama, 1995). Digitalisasi e-SAKIP berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui keterbukaan

informasi kinerja. Masyarakat dapat melihat secara jelas capaian program pemerintah, termasuk sejauh mana program tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterbukaan ini menciptakan hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat, di mana pengawasan publik menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial yang konstruktif. Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Tabel 2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Sebelum dan Sesudah e-SAKIP

Aspek	Temuan di Kota Palembang	Temuan Penelitian Lain
Peningkatan capaian kinerja	Ada peningkatan capaian kinerja setelah implementasi e-SAKIP	Peningkatan efisiensi pelaporan dan tingkat akuntabilitas setelah penerapan e-SAKIP
Efisiensi penggunaan anggaran	Efisiensi anggaran meningkat dengan perbaikan pelaporan dan akuntabilitas	Keberhasilan sistem sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur dan SDM
Kualitas pelaporan	Pelaporan lebih terstruktur, integratif, dan real-time	Digitalisasi harus dibarengi peningkatan kualitas data dan disiplin SDM
Nilai akuntabilitas	Meningkat dari kategori sedang ke kategori baik, tapi belum mencapai predikat "A"	Progress ada tapi masih terdapat gap manajemen kualitas data dan pemanfaatan sistem
Kendala	Pembatasan oleh aspek SDM dan integrasi proses pelaporan	Kesiapan SDM dan integrasi proses penting bagi efektivitas sistem
Efektivitas e-SAKIP	Menyediakan data kinerja tepat waktu, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan transparansi, memperbaiki koordinasi dan akuntabilitas	Digitalisasi efektif jika memperhatikan konteks sosio teknis
Kebutuhan penguatan	Perlu penguatan kompetensi SDM dan perbaikan integrasi fitur untuk menghindari hambatan teknis pelaporan	Penguatan SDM dan teknis penting untuk kualitas pelaporan dan responsivitas pelayanan publik

Sumber: Alfia Media, 2025; Ardiana, 2024; Mulyana, 2021; Rama et al., 2025

Transformasi ekonomi politik di Kota Palembang sangat dipengaruhi oleh kemajuan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis digital, khususnya melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (e-SAKIP). Dengan digitalisasi ini, pemerintah daerah mampu meningkatkan sinergi dan koordinasi antara berbagai program pembangunan ekonomi digital serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan kinerja aparat pemerintah kota. Salah satu dampak utama digitalisasi e-SAKIP adalah peningkatan daya saing daerah. Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong munculnya inovasi dalam berbagai sektor pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Pemerintah dapat merespons lebih cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan ekonomi berkat sistem yang menyediakan data kinerja secara akurat dan real-time. Lebih jauh, e-SAKIP berkontribusi pada reformasi birokrasi, dengan mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan mendorong tata kelola yang lebih inklusif dan partisipatif. Hal ini menjadi sangat penting di era Revolusi

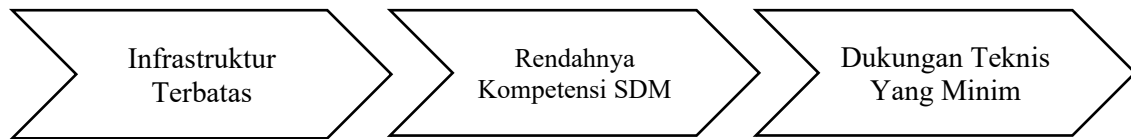
Industri 4.0, di mana inovasi teknologi dan digitalisasi menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi dan politik. Pemerintah Kota Palembang melalui e-SAKIP mampu menghadirkan manajemen kinerja yang terukur, transparan, dan efektif, sekaligus menguatkan peran pemerintah dalam arena ekonomi politik lokal dan nasional.

Implementasi e-SAKIP juga membantu membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan pemantauan kinerja yang berkelanjutan. Kepercayaan ini penting bagi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena keterlibatan serta dukungan masyarakat dalam membangun kota semakin meningkat. Oleh karena itu, e-SAKIP bukan hanya alat administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat transformasi ekonomi politik Kota Palembang (Sumsel Pers, 2024; Menpan RB, 2017).

3.3. Implikasi Praktis dan Akademik di Era Industri 4.0

Setiap lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk mempersiapkan, merancang, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, berkala, dan terorganisir. Tujuan dari laporan kinerja ini adalah untuk menyampaikan hasil kinerja lembaga pemerintah dalam satu tahun anggaran yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan serta sasaran lembaga tersebut. Lembaga pemerintah yang terkait wajib untuk mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dalam tingkat kinerja yang telah dicapai. Penyampaian kinerja oleh lembaga pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen yang disebut LAKIP. Pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan LAKIP adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab fungsional untuk memberikan dukungan administratif di lembaganya masing-masing. Pemimpin lembaga, sesuai dengan yang tertera dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, berhak untuk membentuk tim kerja yang akan membantu penanggung jawab LAKIP di lembaga yang bersangkutan.

Berdasarkan penyelesaian permasalahan di atas, cara untuk mengoptimalkan peran e-SAKIP dalam pelayanan publik, pemerintah daerah memerlukan penerapan strategi penguatan yang komprehensif. Strategi tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta penyempurnaan regulasi pendukung digitalisasi. Di samping itu, integrasi e-SAKIP dengan sistem pelayanan publik lainnya menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem pemerintahan digital yang utuh. Integrasi ini memungkinkan pelayanan publik yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan bahwa pengembangan sistem digital pemerintahan harus mengintegrasikan investasi teknologi dengan pengembangan SDM melalui pelatihan rutin dan penyediaan dukungan teknis yang memadai. Kebutuhan ini muncul karena digitalisasi yang parsial tanpa kesiapan SDM dan infrastruktur menyebabkan kegagalan fungsi sistem yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan efisiensi pemerintah daerah (Ballu, D. Z. A., 2025). Dari sudut pandang akademik, temuan ini memperkaya literatur *digital governance* dengan menegaskan bahwa keberhasilan *e-government* dalam konteks SAKIP sangat bergantung pada sinergi teknologi, manusia, dan proses organisasi. Penelitian ini juga mendukung teori adaptasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan era Industri 4.0 yang menuntut fleksibilitas dan kapasitas belajar organisasi sebagai kunci keberlanjutan perubahan (Mulyana, 2021).



Gambar 1. Diagram Hambatan Digitalisasi e-SAKIP

Berdasarkan Gambar 1, dapat dijelaskan bahwa :

1. Infrastruktur terbatas

Keterbatasan jaringan internet dan perangkat teknologi mempengaruhi kelancaran proses pengelolaan data dan pelaporan. Keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi e-SAKIP di berbagai instansi pemerintah daerah. Infrastruktur yang dimaksud mencakup ketersediaan jaringan internet yang stabil, perangkat keras komputer, serta sistem pendukung teknologi informasi yang memadai. Dalam praktiknya, tidak semua organisasi perangkat daerah memiliki akses jaringan internet dengan kualitas yang baik. Kondisi tersebut menyebabkan proses input data, pengelolaan dokumen kinerja, hingga pelaporan melalui sistem digital sering mengalami hambatan. Keterbatasan jaringan internet, terutama pada instansi yang berada di lokasi dengan konektivitas rendah, dapat memperlambat proses sinkronisasi data dan pengiriman laporan kinerja. Akibatnya, pengelolaan data yang seharusnya dilakukan secara real time menjadi tertunda. Selain itu, perangkat teknologi seperti komputer atau server yang tidak memadai juga dapat menghambat operasional sistem, baik dari segi kecepatan akses maupun kapasitas penyimpanan data.

2. Rendahnya kompetensi SDM

Banyak pegawai belum memiliki kompetensi digital yang memadai, sehingga proses pelaporan dan pengelolaan data menjadi tidak optimal. Selain keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi e-SAKIP di lingkungan pemerintahan daerah. Transformasi sistem akuntabilitas yang berbasis digital menuntut aparatur sipil negara memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai, termasuk dalam pengelolaan data kinerja, penginputan indikator program, serta penyusunan laporan berbasis sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya masih banyak pegawai yang belum sepenuhnya memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem tersebut secara efektif. Keterbatasan kompetensi digital ini sering menyebabkan proses pengisian data kinerja menjadi kurang akurat, tidak konsisten, atau bahkan mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, pemahaman yang belum optimal mengenai konsep manajemen kinerja dan indikator capaian program juga dapat mempengaruhi kualitas data yang diinput ke dalam sistem. Akibatnya, informasi yang dihasilkan melalui e-SAKIP tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi secara objektif dan terukur.

3. Dukungan teknis yang minim

Kurangnya dukungan teknis dan fasilitas pendukung menyebabkan sistem sering mengalami gangguan dan tidak dapat berjalan maksimal. Minimnya dukungan teknis juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi e-SAKIP di lingkungan pemerintahan daerah. Dukungan teknis yang dimaksud meliputi ketersediaan tenaga ahli teknologi informasi, layanan pemeliharaan sistem, serta fasilitas pendukung yang mampu memastikan sistem berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, tidak

semua instansi pemerintah memiliki tim teknis yang memadai untuk menangani permasalahan teknis yang muncul selama proses penggunaan sistem.

Keterbatasan dukungan teknis sering menyebabkan gangguan pada sistem, seperti kesalahan akses, lambatnya proses pemrosesan data, hingga kesulitan dalam melakukan pembaruan sistem. Ketika gangguan tersebut terjadi, pegawai yang bertugas mengelola data kinerja sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proses input maupun laporan secara tepat waktu. Kondisi ini tentu dapat menghambat efektivitas pengelolaan data kinerja dan mengurangi optimalisasi fungsi e-SAKIP sebagai instrumen akuntabilitas birokrasi. Tanpa penanganan serius terhadap hambatan-hambatan tersebut, optimalisasi dan manfaat penuh dari digitalisasi e-SAKIP tidak dapat tercapai. Penguatan infrastruktur teknologi harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan pelatihan SDM agar mereka mampu mengoperasikan sistem secara efektif. Dukungan teknis yang memadai juga perlu disiapkan agar gangguan teknis dapat segera ditangani. Dalam konteks ini, diagram berfungsi sebagai alat visual penting untuk mengidentifikasi fokus strategis perbaikan yang diperlukan demi kesuksesan transformasi digital kinerja pemerintahan Kota Palembang.

4. KESIMPULAN

Digitalisasi e-SAKIP bukan sekadar inovasi administratif, melainkan instrumen strategis dalam memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Pengalaman Kota Palembang menunjukkan bahwa pemanfaatan e-SAKIP secara optimal mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong transformasi ekonomi politik yang berkelanjutan. Digitalisasi e-SAKIP di Kota Palembang membuktikan perannya sebagai instrumen strategis dalam mendukung transformasi ekonomi politik di era Revolusi Industri 4.0. Sistem ini mengoptimalkan proses perencanaan dan evaluasi kinerja melalui platform digital terintegrasi yang menghubungkan seluruh tahapan siklus manajemen kinerja dari RPJMD hingga RKPD dengan indikator terukur berbasis SMART, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi duplikasi data. Dampak transformasi ekonomi politik terlihat dari peningkatan daya saing daerah, terciptanya iklim investasi yang kondusif, dorongan inovasi dalam pelayanan publik, serta penguatan reformasi birokrasi yang modern dan adaptif. Namun demikian, implementasi e-SAKIP masih menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia yang rendah dalam penguasaan teknologi digital, minimnya dukungan teknis, lemahnya fungsi pengawasan dari Inspektorat, dan permasalahan dualisme sistem dimana proses pelaporan manual masih berjalan paralel dengan sistem digital sehingga menyebabkan reduplikasi data, keterlambatan pelaporan, dan tingkat kesalahan data yang tinggi. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan mengoptimalkan peran e-SAKIP sebagai instrumen transformasi, pemerintah kota perlu memprioritaskan investasi infrastruktur teknologi informasi dengan pemerataan akses jaringan internet yang stabil di seluruh perangkat daerah.

BIOGRAFI PENULIS

Pandu Pamungkas, S.A.N., M.Si. adalah seorang dosen di Universitas Sriwijaya, yang mengkhususkan diri dalam tridharma perguruan tinggi. Dia memegang gelar sarjana di Administrasi Negara dari Universitas Lampung dan gelar Magister dari Universitas

Pamungkas et al.

Lampung. Saat ini, dia adalah seorang pengajar aktif di Universitas Sriwijaya dengan fokus pada Pelayanan Publik.

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=4bmNv20AAAAJ&hl=id>

Email: pandupamungkas@fisip.unsri.ac.id

Zetia Wijayanti, S.I.P., M.A.P. adalah seorang dosen di Universitas Sriwijaya, yang mengkhususkan diri dalam tridharma perguruan tinggi. Dia memegang gelar sarjana di Administrasi Negara dari Universitas Sriwijaya dan gelar Magister dari Universitas Diponegoro. Saat ini, dia adalah seorang pengajar aktif di Universitas Sriwijaya dengan fokus pada Kebijakan Publik.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6_UBUxQAAAAJ

Email: zetiawijayanti@fisip.unsri.ac.id

Adelia Maharani merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis sedang dalam tahap penyusunan skripsi.

Email: adeliamaharani@gmail.com

Metta Karuna merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis sedang dalam tahap penyusunan skripsi.

Email: mettakaruna21@gmail.com

Ani Santia merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis sedang dalam tahap penyusunan skripsi.

Email: santia_ani3@gmail.com

Tegar Victor Pratama Aritonang merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis sedang dalam tahap penyusunan skripsi.

Email: tegararitonang99@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

Admin. (2024). Membanggakan, pemerintah Kota Palembang raih penghargaan SAKIP Awards 2024. *Sumselpers.com*.
<https://www.sumselpers.com/2024/10/membanggakan-pemerintah-kota-palembang.html>

- Ardiana, N. N., Prabawati, N. P. A., & Wijaya, K. A. S. (2024). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance (studi kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi). *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(4), 20–31.
- Ballu, D. Z. A. (2025). *Efektivitas e-SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah*.
- Nabilla, C. Q. (2024). Efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP) dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Palembang. *Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan*. Universitas Sriwijaya.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Ekawati, Y. (2022). Interpretasi ekosistem ekonomi digital bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekowirausaha dan Bisnis*.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Free Press.
- Hamdan, H. (2018). Industri 4.0: Pengaruh revolusi industri pada kewirausahaan demi kemandirian ekonomi. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 3(2), 1–8. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12142>
- Hasan, I. (2022). Peluang, tantangan dan strategi bisnis dalam era industri digital. *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Milki. (2025). Implementasi SAKIP: Tantangan, keberhasilan, dan upaya mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah. *Garut Berkabar News*. <https://garutberkabar.com/implementasi-sakip-tantangan-keberhasilan-dan-upaya-mewujudkan-akuntabilitas-pemerintah-daerah-sanggita-salsabilla-putri-noeryadin-mahasiswa-program-studi-ilmu-pemerintahan-universitas-jenderal-a/>
- Mulyana, B. (2021). Evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13(1), 1–18.
- Pemerintah Kota Palembang. (2025). *Website resmi Pemerintah Kota Palembang*. <https://palembang.go.id/dokumen/lkjip-kota-palembang-2023>
- Pemerintah Kota Palembang. (2023). *Laporan kinerja instansi pemerintah Kota Palembang (LKJIP 2022)*.
- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. (2024). Effectiveness of using the e-SAKIP application in monitoring performance.
- Produk Digital. (2024). Tingkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui integrasi e-SAKIP. *Afila.co.id*. <https://afila.co.id/blog/detail/tingkatkan-sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah-melalui-integrasi-e-sakip>
- Rama. (2025). *Efektivitas sistem akuntabilitas kinerja di sekretariat daerah Kota Palembang*.
- Wakhyudi. (2007). *Akuntabilitas instansi pemerintah* (Revisi). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

- Kementerian PANRB. (2025). Launching e-SIPD dan e-SAKIP di Palembang: Momentum baru peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Winarno, B. H., & Laurens, S. (2024). Analisis dampak revolusi industri 4.0 terhadap administrasi publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12107–12112.
- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10(2), 51–60.
- Yusrianti, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 13(4), 545–558.